

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2010 – 2015

A. Pendahuluan

Pimpinan Pusat telah menetapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Muhammadiyah 2010 – 2015 “Terwujudnya Kondisi dan Faktor – Faktor Pendukung Bagi Perwujudan Masyarakat Islam yang Sebenar – Benarnya”. Visi tersebut pada periode Muktamar 2010 – 2015 yang bertema “Mobilisasi dan Peningkatan Kualitas” dilengkapi dengan program bidang Penanggulangan Bencana yang koordinasinya diserahkan kepada Lembaga Penanggulangan Bencana atau yang memiliki sebutan dalam bahasa Inggris *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC). Visi pengembangan periode 2010 – 2015 sendiri adalah “Meningkatnya konsolidasi gerakan dan mantapnya manajemen organisasi di seluruh jenjang dan jenis kepemimpinan, serta untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah bagi peningkatan kualitas dakwah yang dilakukan oleh persyarikatan dan amal usaha”.

Sebagai lembaga baru yang merupakan pengembangan dari unit kegiatan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Periode 2005-2010, Lembaga Penanggulangan Bencana dengan cepat melakukan konsolidasi sumberdaya Muhammadiyah yang memungkinkan digerakkan dalam program penanggulangan bencana, dengan tetap menjaga tradisi Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), spirit Al Maun dan berbasis kepada kekuatan kemandirian akar rumput yang merupakan kekuatan Muhammadiyah hingga terus berkembang hingga lebih dari satu abad, pelaksanaan program diarahkan pada pendekatan Manajemen Bencana yang merujuk pada Kerangka Aksi Hygo 2005 – 2015 untuk mengupayakan Pengurangan Risiko Bencana sebagai inisiatif global dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Disamping itu, mengingat wilayah kerja Penanggulangan Bencana adalah di seluruh wilayah Indonesia, kegiatan penanggulangan bencana Muhammadiyah 2010 – 2015 juga menjadikan peraturan perundangan yang berlaku sebagai referensi untuk bergerak, termasuk juga peraturan mengenai penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Kegiatan penanggulangan bencana selama periode 2010 – 2015 berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Muhammadiyah baik kader, amal usaha, zakat dan infaq serta struktur Muhammadiyah dalam upaya penanggulangan bencana. Kerjasama aktif dengan LAZISMU, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Tarjih, Majelis Dikti, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Aisyiyah serta jaringan struktural PWM dan PDM berjalan dengan efektif.

Penghargaan sebagai organisasi masyarakat paling aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana tahun 2013 dan juga tahun 2014 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi bukti apresiasi keberhasilan program. Demikian juga dengan undangan menjadi pembicara, menjadi fasilitator, menjadi pelatih, menjadi peserta pelatihan hingga kerjasama pelaksanaan program dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat Provinsi dan Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga lembaga dunia seperti UNICEF dan UNOCHA, Pemerintah Australia atau NGO Internasional seperti Direct Relief

International, Help Age Internasional dan Word Vision menjadi bukti kepercayaan publik kepada keberhasilan pelaksanaan program kerja .

Selama 2010 -2015 Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana juga diakui pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana sehingga dipercaya menjadi Pimpinan Humanitarian Forum Indonesia, menjadi Pimpinan (presidium) pada Konsorsium Pendidikan Bencana dan juga menjadi pimpinan pada Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana.

Bukti keberhasilan lainnya adalah terus mengalirnya sumbangan dari masyarakat, baik jaringan internal Muhammadiyah, CSR dari swasta, hingga sumbangan masyarakat sipil dari luar negeri yang dikelola bersama antara Lembaga Penanggulangan Bencana dan LAZISMU menjadi catatan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja periode 2010 – 2015.

B. Program Kerja

Secara khusus, visi pengembangan Lembaga Penanggulangan Bencana periode 2010-2015 adalah “Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat”, yang oleh Mukhtar Muhammadiyah 2010 diterangkan dalam Program Pengembangan Penanggulangan Bencana yang tercantum di bawah ini :

- Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana
- Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (response time dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana.

Pada pelaksanaannya, program pengembangan diatas, dirumuskan dalam ciri pengembangan yang terdiri dari **Sistem Gerakan, Organisasi dan Kepemimpinan , Jaringan , Sumberdaya dan Aksi Pelayanan**

Pencapaian pada **Pengembangan Sistem Gerakan** adalah berhasil dibahasnya naskah Fikih Penanggulanga Bencana yang dikembangkan bersama dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

Pada program **Pengembangan organisasi dan kepemimpinan**, tercapai upaya koordinasi dan konsolidasi di tingkat nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tahun 2011 dan 2014 yang diikuti juga dengan kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Pimpinan Wilayah, pendirian LPB PWM di 20 Provinsi dan berlakunya panduan mekanisme organisasi dan

pengembangan panduan operasional tanggap darurat . Secara terbatas telah dikembangkan juga pusat logistik nasional di Yogyakarta beserta mekanismenya dan inisiasi terbatas pusat pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Majelis Pembina Kesehatan Umum.

Pada program **Pengembangan Jaringan**, tercapai hubungan yang intensi dan saling menguntungkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan di tingkat nasional, juga tercapai hubungan baik juga lembaga penanggulangan bencana internasional. Tercapai juga posisi strategis Muhammadiyah dalam upaya bersama membangun jaringan Pengurangan Risiko Bencana dan kerja-kerja kemanusiaan melalui posisi Muhammadiyah yang diakui oleh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di tingkat nasional sehingga masuk dalam Dewan Pengarah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, Presidium Konsorsium Pendidikan Bencana, Pimpinan Humanitarian Forum Indonesia, serta aktif dalam koordinasi Kluster Kesehatan dan koordinasi Kluster Pendidikan. Kegiatan yang lain berupa aktifnya dalam upaya advokasi kebijakan seperti upaya penerbitan kebijakan tentang Fasilitas Kesehatan yang Aman dari Kedaruratan dan Bencana bersama Kementerian Kesehatan, upaya penerbitan kebijakan Sekolah Aman bersama Kementerian Pendidikan. Upaya sejenis juga tercapai di Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah walaupun masih dalam terbatas.

Pengembangan Jaringan di internal Muhammadiyah, tercapai komunikasi aktif dengan mengerjakan program bersama di lapangan secara terbatas seperti dengan majelis tarjih mengembangkan fikih penanggulangan bencana, majelis lingkungan hidup mengembangkan rehabilitasi lingkungan merapi, majelis pendidikan tinggi mengembangkan inisiasi pusat studi dan penelitian penanggulangan bencana, majelis pembina kesehatan umum mengembangkan Rumah Sakit Siaga Bencana dan penguatan kemampuan manajemen kedaruratan dan bencana bagi karyawan rumah sakit, majelis pemberdayaan masyarakat mengembangkan rehabilitasi pertanian dan ekonomi di banjarnegara dan juga dengan LAZISMU mengembangkan sistem fundrishing penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan serta penerapan sekolah siaga bencana. Ditingkat Pimpinan Wilayah dan pimpinan daerah, penguatan jaringan internal ini dilakukan dengan membentuk jaring-jaring relawan dari unsur angkatan muda Muhammadiyah dan karyawan amal usaha Muhammadiyah, serta sistem fundrishing dengan LAZISMU di tingkat wilayah dan daerah.

Pada Program **Pengembangan Sumberdaya**, tercapai program pelatihan relawan Muhammadiyah melalui pengembangan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, pelatihan relawan kesehatan, SAR, psikosial, logistik dan juga pendidikan, gladi kesiapsiagaan regional dan latihan gabungan relawan yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, serta pengadaan perlengkapan kegiatan tanggap darurat di tingkat nasional bersama LAZISMU. Strategi pemenuhan kebutuhan peralatan di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dilakukan dengan sangat terbatas dan menggunakan sumberdaya peralatan BPBD karena hubungan yang terjalin baik. Penguatan kompetensi di luar negeri melalui pelatihan di Bangkok, Singapura dan Kuala Lumpur juga telah dilakukan. Kerjasama pengadaan perangkat operasi juga dilakukan dengan relasi dari

luar negeri seperti Palang Merah Singapura. Kerjasama penguatan kompetensi khususnya bidang kesehatan juga bekerjasama dengan lembaga luar negeri melalui program AIFDR yang merupakan kerjasama Pemerintah Australia dan BNPB.

Pada ciri **Pengembangan Aksi Pelayanan**, tercapai program dengan aktif dalam memberikan bantuan tanggap darurat dan rehabilitasi dalam koordinasi Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah nyaris di semua provinsi di Indonesia. Tahun 2010 di 5 kejadian bencana, tahun 2011 di 10 kejadian bencana, tahun 2012 di 15 kejadian bencana, tahun 2013 di 18 kejadian bencana, tahun 2014 di 8 kejadian bencana dan pada tahun 2015 di 4 kejadian bencana. Satu misi bantuan luar negeri ke Topan Haiyan Filipina telah dilakukan pada tahun 2013. Kegiatan serupa dilakukan aktif dilakukan juga oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah walaupun baru terbatas oleh 4 PWM saja, sehingga harus ditopang oleh koordinasi sumberdaya dari 4 PWM tersebut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kerjasama pengadaan bantuan kemanusiaan dari lembaga luar negeri juga dilakukan, seperti dengan Pemerintah Australia, World Vision dan Direct Relief International pada saat erupsi Merapi 2010.

Pencapaian diatas merupakan hasil dari upaya menerjemahkan visi berlandaskan tradisi organisasi dan mendialogkannya dengan perkembangan manajemen bencana dan bantuan kemanusiaan yang berkembang di dunia. Pencapaian tersebut juga menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kalah besar termasuk dengan berkembangnya wacana Pengurangan Risiko Bencana melalui deklarasi Sendai 2015. Agenda penguatan kapasitas daerah dengan penguatan manajemen koordiansi, kepemimpinan, jaringan dan sumberdaya di tingkat nasional masih harus terus diupayakan.

C. Realisasi Capaian Program

- I. **Sistem Gerakan** : Hal yang berkaitan dengan aspek nilai dan konsep, yang berkaitan dengan hal yang yang mendasar dalam Muhammadiyah
Pelaksanaan program kerja dalam ciri pengembangan Sistem Gerakan sebagai berikut:
 1. **Pengkajian Teologi Bencana** telah dilakukan dengan koordinator kegiatan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah dengan kegiatan Penyusunan Fikih Kebencanaan untuk menjadi bagian dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
Kegiatan yang sudah berjalan :
 - (a) Workshop Fikih Kebencanaan di Univ Muhammadiyah Yogyakarta – 25 Juni 2014,
 - (b) penyusunan tim penulis buku Fikih Bencana beranggotakan anggota MTT dan Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muh- Juli 2014,
 - (c) proses penulisan naskah Oktober 2014 – april 2015.
 2. **Mengkaji Himpunan Putusan Tarjih dan Pedoman Hidup Islami untuk Panduan Korban dan Relawan Bencana** dijadikan satu dengan program Pengkajian Teologi Bencana, menjadi salah satu bab dalam buku Fikih Kebencanaan yang dikoordinasikan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muh dalam penyusunannya, dan LPB PPP Muh menjadi bagian dari tim penyusunnya.

II. **Organisasi dan Kepemimpinan** : Hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan kekuatan penggerak dalam Muhammadiyah

1. **Rapat Kerja Nasional** : Rakernas I telah terlaksana pada 1-2 Juli 2011 di Univ Muhammadiyah Surabaya, Rakernas II direncanakan pada 29-30 Desember 2014 di Univ Muhammadiyah Magelang.

Pada Rakernas I telah dicapai dokumen berkaitan strategi dan panduan pelaksanaan program ditingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah. Sementara pada Raekernas II telah tercapai rekomendasi untuk keberlanjutan program Penanggulangan Bencana di Muhammadiyah periode 2015 – 2020.

Kegiatan Rakernas, Rakerwil dan Rakerda Lembaga Penanggulangan Bencana dilakukan sekaligus kegiatan syiar dan penguatan kapasitas pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana, seperti dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional I 2011 di Surabaya yang dirangkai dengan Latihan Gabungan Relawan Muhammadiyah dan Kuliah Umum Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kegiatan Rakernas, Rakerwil dan Rakerda LPB juga menjadi sarana untuk berkoordinasi dengan lembaga – lembaga yang ada pada pemerintah pusat (BNPB) dan juga pemerintah daerah sehingga bisa menjadi pintu masuk kerjasama dengan pemerintah secara seajar.

2. **Penyusunan Panduan Bangunan dengan wawasan Pengurangan Risiko Bencana untuk aset Muhammadiyah** : program ini masih dalam tahap inisiasi denganm penyediaan perangkat dan panduan retrofit bangunan sekolah dan Rumah Sakit dari program Child Disaster Awareness and School Communities - CDASC (2007-2009), program Hospital and Community Preparedness for Disaster Management (2009 – 2011) dan juga program Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (2015).

Upaya pelibatan teknik sipil perguruan tinggi Muhammadiyah telah dilakukan juga, khususnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Upaya ini bisa menjadi awal dari pelibatan secara masif dan sistemik mengingat banyaknya bangunan Muhammadiyah yang perlu mendapatkan panduan keamanan dari ancaman bencana maupun memenuhi prosedur keselamatan bangunan.

3. **Pengadaan Pusat Logistik** : Program berjalan sebagian, dari rencana tiga pusat logistik (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya) baru direalisasikan 1 pusat logistik di Yogyakarta dengan menyewa 1 buah rumah untuk gudang logistik dan perlengkapan.

Program ini dalam pelaksanaannya didukung dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen humanitarian logistik kerjasama dengan Kuehne Foundation - NUS HumLog Centre, Pusat Studi Transportasi UGM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat di Surabaya (19-20 November 2013) , Medan (24-25 Februari 2014). Kegiatan ini diikuti oleh utusan dari LPB PWM di

regional, BPBD, utusan PTM, organisasi Penanggulangan Bencana (PMI, anggota Humanitarian Forum Indonesia)

Kegiatan pendukung diatas telah membuka kesadaran bersama bahwa pengelolaan logistik bukan sekedar pengadaan barang, namun juga perlunya koordinasi dan berlakunya standar – standar bantuan kemanusiaan yang berlaku di dunia. Muhammadiyah melalui kegiatan diatas telah menjadi lembaga pelopor bantuan kemanusiaan yang terencana dan akuntabel. Upaya ini juga membantu penguatan manajemen pelaksana kegiatan, mengingat besarnya partisipasi masyarakat ikut menyumbang bantuan kemanusiaan melalui Muhammadiyah bila terjadi bencana.

4. **Penyusunan dan Sosialisasi Standar Rapid Needs Asesment-Damage and Loss Asesment** : Program berjalan dengan diterbitkannya SK Nomor: 010/KEP/I.17/B/2012 tentang Panduan Kaji Kondisi Tanggap Darurat Bencana. Sosialisasi panduan tersebut selain dicetak dan disampaikan ke semua pimpinan LPB ditingkat PWM ketika Rakernas, juga ditempatkan di website www.mdmc.or.id untuk bebas diunduh.

Kegiatan dilakukan dengan kegiatan pendukung sebagai berikut :

- (1) sosialisasi panduan asesment pada rakernas I LPB pada tahun 2011, di Surabaya.
- (2) workshop kaji cepat pada 15-16 November 2012 di Univ. Muhammadiyah Yogyakarta .
- (3) sosialisasi pada Rakernas II LPB pada tahun 2014 di Magelang.

Panduan ini didesain sebagai dokumen yang memungkinkan untuk terus direvisi melalui manajemen umpan balik dari pengguna panduan, khususnya pada kegiatan yang langsung ada tim asistensi dari LPB PP Muhammadiyah.

5. **Mendirikan LPB di seluruh PWM dan PDM yang memerlukan** : Pendirian LPB PWM hingga November 2014 ada 20 PWM, sementara untuk LPB PDM yang terdata baru di Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Daftar LPB PWM hingga Desember 2014:

- a. LPB PWM Jawa Tengah
- b. LPB PWM Jawa Timur
- c. LPB PWM Jawa Barat
- d. LPB PWM DKI Jakarta
- e. LPB PWM DI Yogyakarta
- f. LPB PWM Sumatera Utara
- g. LPB PWM Sumatera Barat
- h. LPB PWM Sumatera Selatan
- i. LPB PWM Bengkulu
- j. LPB PWM Jambi
- k. LPB PWM Riau
- l. LPB PWM Lampung

- m. LPB PWM Bali
- n. LPB PWM Kalimantan Barat
- o. LPB PWM Kalimantan Timur
- p. LPB PWM Sulawesi Selatan
- q. LPB PWM Sulawesi Utara
- r. LPB PWM Sulawesi Tengah
- s. LPB PWM Maluku
- t. LPB PWM Banten

Pendirian LPB PWM selain bersarkan kesadaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, juga berdasarkan upaya advokasi dan pendampingan dari LPB PP Muhammadiyah. Sosialisasi pentingnya kerja penanggulangan bencana di Muhammadiyah dilakukan melalui program pendampingan khusus maupun bersamaan dengan program lainnya, seperti program pelatihan relawan. Bahkan ada beberapa LPB PWM yang dibentuk setelah terjadinya tanggap darurat bencana di suatu daerah.

Terbatasnya personil di Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah memang menjadi permasalahan utama selain juga adanya anggapan umum bahwa kegiatan penanggulangan bencana adalah kegiatan kalau terjadi bencana saja. Kegiatan – kegiatan mitigas, advokasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah, hingga pendidikan kesiapsiagaan masyarakat belum sepenuhnya berhasil ditangkap oleh sebagian Pimpinan Muhammadiyah dan Ortom di tingkat PWM dan PDM.

6. **Sosialisasi Nomenklatur LPB** : Program ini dilaksanakan dengan ditetapkan dan penerbitan SK no 006/KEP/I.17/B/2012 tentang Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

Tahapan kegiatannya sebagai berikut :

- (a) pembahasan naskah SOP MDMC yang disusun oleh tim MDMC 2007-2010 pada reker pengurus LPB di tawangmangu 2010,
- (b) pembahasan naskah pada Rakernas I LPB tahun 2011 di Surabaya,
- (c) sosialisasi dokumen pada Rakernas LPB 2014 di Magelang.

Setelah panduan diterbitkan, naskah juga bisa didownload melalui website www.mdmc.or.id.

Kegiatan ini menjadi penting mengingat Lembaga Penanggulangan Bencana adalah lembaga baru di kalangan persyarikatan. Semua pelaku di tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah memerlukan panduan, rujukan dan referensi untuk menjalankan program kerjanya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di persyarikatan, panduan akan lebih baik bila dibahas dalam agenda biro organisasi dan pada periode selanjutnya diterbitkan sebagai Qoidah Lembaga Penanggulangan Bencana.

7. **Menyusun Tata Kelola Keuangan** : mekanisme tata kelola keuangan di internal LPB PP Muh sudah diterapkan secara terbatas, namun untuk panduan keuangan

baru sebatas penugasan kepada bendahara untuk mengkaji draft Mekanisme Keuangan yang disusun tim MDMC 2007-2010 .

8. Pengembangan Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) - pelatihan peningkatan kapasitas untuk Komunitas.

Kegiatan ini menjadi kegiatan yang mengalami berbagai inovasi sesuai dengan karakter dan tradisi yang berlaku di Muhammadiyah. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi buku Jamaah Tangguh Bencana yang disusun MDMC periode 2007-2010 dilakukan melalui website www.mdmc.or.id dan di berbagai pertemuan, kegiatan dan pameran yang dilakukan LPB PP .

Pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah sebagai berikut :

(a) program VACHRI (Volcano Community and Hospital Rings) - Peningkatan Kesiapsiagaan Komunitas dan Rumah Sakit di jaringan Muhammadiyah di sekitar Gunung Merapi pada tahun 2011, program ini berlanjut terus ditingkat komunitas berupa kepeloporan BP PKU Muhammadiyah Cangkringan dalam kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD Kab. Sleman. Pelaksanaan program ini juga menjadi sarana penguatan BP PKU Muhammadiyah Cangkringan (bersama MPKU PWM DIY) yang pasca erupsi Merapi 2010 kekurangan dokter.

(b) pelatihan relawan komunitas Kelud – 2014.

(c) menjadi fasilitator dalam program pengembangan kesiapsiagaan komunitas di Yogyakarta dan Magelang (2014)

(d) bersama UNICEF dan PMI mengelola program pelatihan Kesiapsiagaan Bencana untuk Komunitas Remaja dan Sekolah di DKI Jakarta (2014),

(e) bersama majelis Lingkungan Hidup PP Muh dan LAZISMU menyelenggarakan program kesiapsiagaan dan rehabilitasi lingkungan pasca erupsi merapi di Polengan – Magelang (2011).

Pada tingkat PWM dan PDM dilakukan dengan beberapa variasi kegiatan, seperti di Jawa Timur dilakukan dengan KKN Pasca Bencana kerjasama LPB PWM Jatim dan Univ Muhammadiyah Sidoarjo, pasca Erupsi Gunung Kelud 2014.

Sementara di Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut

- LPB PWM Jateng mengerjakan proyek pengembangan desa tangguh bencana yang diselenggarakan oleh BP BD Kabupaten Banyumas yaitu :
 - Desa Melung untuk ancaman erupsi Gunung Slamet tahun 2013
 - Desa Selandaka untuk ancaman banjir tahun 2013
 - Desa Sikapat untuk ancaman erupsi Gunung Slamet tahun 2014
 - Desa Nusadadi untuk ancaman banjir tahun 2014

- LPB PWM Jateng mengerjakan proyek pengembangan OPRB (organisasi PRB tingkat desa) di 13 Desa KRB banjir lahar hujan Merapi di Kabupaten Magelang tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Rekompak DPU .

- LPB Jateng bekerja sama dengan LPCR pada tahun 2012 dengan program penguatan cabang dan ranting dengan basis bencana, serta pendataan kawasan rawan bencana di cabang dan ranting.
- LPB PWM Jateng Sosialisasi Budarna (Budaya Sadar Bencana) yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2012, 2013 dan 2014
- LPB PWM Jateng Kerja sama dengan PW Pemuda Muhammadiyah menyelenggarakan program da'i di daerah rawan bencana di Jawa Tengah di laksanakan tahun 2011-2012

Kegiatan di tingkat PDM dan amal usaha, terekam contoh kegiatan CBDRM sebagai berikut :

- secara berkala LPB PDM Bantul, DIY bersama RS PKU Muhammadiyah Bantul terus membangun kegiatan – kegiatan bersama Kelompok Siaga Bencana di desa Poncosari, Kec. Srandakan. Kegiatan berupa pendampingan penguatan lembaga, penguatan ekonomi warga, kegiatan simulasi dan pelatihan PPGD untuk warga. Program ini diinisiasi oleh program HCPDM 2009 – 2011.
- Secara berkala LPB PDM Lamongan, Jatim bersama RS Muhammadiyah Lamongan terus berkegiatan bersama Kelompok Siaga Bencana di desa Paleran, dan berbagai desa lain di tepian bengawan solo. Kegiatan berupa pelatihan warga dan pelatihan PPGD untuk warga. Program ini diinisiasi oleh program HCPDM 2009 – 2011.
- Secara berkala LPB PDM Gresik, Jatim dan RS Muhammadiyah Gresik bersama warga Kecamatan Dukun membentuk dan melatih relawan siaga bencana di tingkat desa. Pelatihan berupa teknik evakuasi air, bantuan hidup dasar dan distribusi logistik.
- LPB PDM Banjarnegara bersama PWM Jateng dan dibantu beberapa PDM di sekitarnya mendampingi warga korban longsor Banjarnegara membangun relawan komunitas siaga bencana.

Program sejenis secara terbatas dibangun juga dalam kegiatan Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED – 2015) yang diselenggarakan untuk masyarakat di sekitar RS Muhammadiyah Gresik, RS Islam Aisyiyah Malang dan RS Siti Khadijah 1 Makassar.

9. Pendirian Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana :

Secara fisik, pendirian Pusat Pelatihan dan Penanggulangan Bencana belum terwujud, namun berdasarkan rapat kerja pengurus LPB PP Muh tahun 2013 disesuaikan dengan kegiatan :

- 1) Workshop Kurikulum dan Pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Kesiapsiagaan pada 12-13 Juli 2014 (SAR, SAR Medic, Psikososial,

Pendidikan dalam Masa Darurat, Humanitarian Logistik, Medical Comander, Incident Comand System),

- 2) penyusunan Modul Pelatihan Psikososial pada September 2014,
- 3) penyusunan Silabus Pelatihan Medical Comander pada Oktober 2014,
- 4) penerbitan Modul Pelatihan Psikososial pada November 2014,
- 5) penerbitan Silabus Medical Comander pada November 2014,
- 6) penyusunan dan penggunaan modul/Silabus/Kurikulum/buku mitra latih Pelatihan Fasilitator, Pelatihan Incident Comand System, Medical Officer dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana RS oleh fasilitator Komite Kesehatan Bencana RS Muhammadiyah bersama fasilitator lain dalam program Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED – 2015),
- 7) pelatihan Fasilitator Sistem Pengendali Operasi dan Koordinator Operasi Medis Darurat dari RSM Lamongan, LPB PP Muh, MPKU PP Muh, LPB PWM Jatim, LPB PWM Susel, MPKU PWM Jatim, MPKU PWM Susel, FK Unismuh Makassar bersama Dinkes Jatim dan Susel serta BPBD Jatim melalui program Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED – 2015) di Pusdiklat BNPB – Sentul di bulan Maret 2015.
- 8) Meluluskan Fasilitator Pendidikan dalam Masa Darurat melalui keikutsertaan 4 orang fasilitator LPB PP ditambah 5 fasilitator dari UM Jakarta, UM Surabaya, RS Muh Lamongan dalam Pelatihan Fasilitator yang diselenggarakan Kemdikbud – Konsorsium Pendidikan Bencana pada 2-5 Februari dan 2-5 Maret 2015 di Jakarta.

Pembelajaran berharga dari upaya pendirian pusat pendidikan dan latihan ini adalah tercapainya pemetaan potensi pendidik dan pelatih penanggulangan bencana di Muhammadiyah baik itu pelatih SAR, Medis Darurat, Psikososial, Pendidikan Darurat, Manajemen Logistik, Sistem Pengendali Operasi hingga Sekolah Siaga Bencana, Rumah Sakit Siaga Bencana, Komunitas Siaga Bencana yang sudah teruji di tingkat Daerah dan Nasional.

Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah juga menjadi bagian dari pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menugaskan satu personilnya menjadi asesor dengan sertifikat BNSP. Standarisasi kompetensi pelaku penanggulangan bencana di masa depan akan menjadi kunci peningkatan kualitas dan sejauh mana keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana, bahkan hingga tingkat asia maupun internasional.

III. **Jaringan :** Hal yang berkaitan dengan hubungan internal dan eksternal Muhammadiyah.

1. **Membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana kepada publik melalui media massa, website, forum dan juga membentuk forum donatur baik dari kalangan personal, swasta dalam/luar negeri maupun negara donor :**

Kegiatan sudah berjalan dengan baik, khususnya pada dana yang didapatkan melalui kerjasama dengan LAZISMU, lembaga internasional dan Lembaga usaha.

Sosialisasi benruk kegiatan dilakukan juga melalui website www.mdmc.or.id , acount Twitter : @mdmcindonesia , Page Facebook : MDMCIndonesia dan Pusdalops MDMC dan pameran-pameran yang diikuti.

Mengikuti Pameran tingkat lokal nasional dan Internasional, seperti : AMCDRR di Yogyakarta, Oktober 2012.

- 2. Aktif berkomunikasi dan mengupayakan kesepakatan kerjasama dengan BNPB, BPBD, lembaga PBB, Negara donor dan lembaga penanggulangan bencana lain termasuk dalam Humanitarian Forum Indonesia serta mengusahakan Forum Humanitarian di kalangan Muslim :** Cukup berjalan efektif, ditingkat daerah juga cukup efektif dilakukan oleh LPB PWM dan LPB PDM .

Keberhasilan Program dalam Lembaga Nasional :

- a) Humanitarian Forum Indonesia : Muhammadiyah duduk sebagai Ketua Dewan Pembina melalui Prof Syafiq Mughni, duduk sebagai sebagai anggota Dewan Pengawas melalui H. Budi Setiawan, Husnan Nurjuman, dan Ibu Hening Purwati, serta duduk sebagai wakil ketua melalui ibu Rahmawati Husein, PhD.
- b) Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana : Muhammadiyah melalui LPB duduk sebagai Dewan Pembina melalui Ibu Rahmawati Husein PhD dan sebagai koordinator Cluster Koordinasi CSO melalui Arif Nur Kholis.
- c) Konsorsium Pendidikan Bencana : Muhammadiyah melalui LPB duduk sebaga Presidium melalui Arif Nur Kholis.
- d) Koordinasi Kluster Pendidikan, aktif dalam koordinasi dan berkontribusi sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan pelatihan klustes pendidikan.
- e) Koordinasi Kluster Kesehatan, aktif dalam koordinasi dan berkontribusi dalam berbagai upaya mengenai konsep Fasyankes Aman dan standar kompetensi tim medis darurat.

Keberhasilan program di tingkat daerah :

- a. Aktif dan menjadi pengurus di Forum Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Tengah, Bengkulu, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur.
- b. Aktif dan menjadi pengurus di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul, Kab Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Kudus, Kab. Magelang.

Keberhasilan program dalam Forum Internasional :

- a. Menjadi presenter dalam UN OCHA Meeting November 2013 di Bangkok, Thailand
- b. Menjadi presenter dalam Conference on "what are legitimate restriction on misionary activities toward vulnerable group?" , OSLO November 2014
- c. Menjadi Participant dalam Compability and principle between Shariah & International Humanitarian Law, Islamabad Oktober 2014.

- d. Menjadi Koordinator Cluster Akedemisi dalam Regional Consultation, World Humanitarian Meeting - North-South East Asia, Tokyo, Japan , Juli 2014.
- e. Menjadi peserta dalam Workshop on Community Resilience & Human Security: From Complex Humanitarian Emergencies to Sustainable Peace & Development, April 2014
- f. Menjadi member pada Global Humanitarian Policy Forum at UN Headquarter, New York , Desember 2013.
- g. Menjadi peserta dalam Workshop on Promoting community-based disaster risk reduction, CCA and emergency response for older people and other vulnerable groups in ASEAN and Japan, 15-19 Oktober 2012
- h. Menjadi member dalam Asia/Pacific Regional Conference on Ageing: *Older People in Ageing Societies: Burden or Resource?*, Bangkok 4 September 2014.
- i. Menjadi peserta dalam "Southeast Asia Regional Civil Society Conference to Advance the ACDM-CSO Partnership Framework for AADMER Implementation" 9-10 October 2013 in Bangkok, Thailand
- j. Menjadi peserta dalam 17th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) di Bangkok, Thailand
- k. Menjadi peserta dalam Humanitarian Logistic di National University of Singapura, Oktober 2013
- l. Mengelola dan menerima kunjungan dari pejabat Militer dan Sipil dari 25 Negara yang tergabung dalam peserta SEAS (Symposiun on East Asia Security) oleh Embassy of the United States of Amerika , September 2012.
- m. Menjadi calon fasilitator dalam Capacity Building Workshop on Emergency Supply Chain and Disaster Risk Management in ASEAN Countries Workshop, Jakarta Nov 2014.

- 3. Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di sekolah dan Perguruan Tinggi** : kegiatan sesuai indikator keberhasilan masih memerlukan penyempurnaan, kegiatan ada yang berupa inisiasi program, pembuatan pilot project dan pengembangan lingkungan yang mendukung berlangsungnya program dengan koordinasi lembaga terkait.

Kegiatan itu berupa :

- a. Sekolah Muhammadiyah Siaga Bencana dilakukan dengan dana program SAVE OUR SCHOOL dari LAZISMU berupa pendampingan perumusan rencana aksi pengurangan risiko bencana di sekolah dengan sekolah pilot project di MI Muhammadiyah Kalibening – Sawangan – Magelang dan SD Muh Pagak, Kab. Malang.
- b. SekolahMu Aman : dilakukan dengan dana program SAVE OUR SCHOOL dari LAZISMU – CIMB NIAGA berupa program piloting dengan pendampingan dan insentif perbaikan fisik sekolah di MI Muhammadiyah Sumber – Dukun – Magelang dan SD Muhammadiyah di Bantul.
- c. sosialisasi panduan guru dan Lembar Kerja Siswa Sekolah Siaga Bencana yang disusun oleh MDMC periode 2007-2010 melalui website www.mdmc.or.id , pameran-pameran di Yogyakarta (2011,2012, 2013, 2014), Jakarta (2012), Banyuwangi (2013), Bengkulu (2014).
- d. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan dalam Masa Darurat bersama Save The Children, BPBD Prov Jatim, LPB Jatim dan UM Malang di University Inn UMM Desember 2013 dengan peserta 40 persen dari jaringan Muhammadiyah .

- e. diskusi promosi game edukatif Sekolah Aman bersama PLAN International di Taman Pintar Yogyakarta (Nov 2014) dengan peserta 60 persen dari sekolah Muhammadiyah,
- f. Penerbitan Novel Harimau Terakhir Merapi dan Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana di Yogyakarta , 2012.
- g. penyelenggaraan workshop LPB dan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah mengenai program PRB di PTM, 8 Februari 2014.
- h. Workshop dan Seminar Internasional Bidang Kebencanaan: “Peningkatan Kapasitas dan Peran PTM dalam Penanggulangan Bencana” bersama Univ Ahmad Dahlan Yogyakarta, 6-7 Januari 2015.
- i. Pusat studi bencana berdiri atas inisiasi mandiri PTM di UMY, UM Bengkulu, UAD, UM Purwokerto dan Prodi Pendidikan Geografi UM Surakarta.
- j. Pelatihan PRB untuk Mahasiswa bekerjasama dengan PC IMM Malang , Mei 2014.
- k. Memfasilitasi Workshop Peran Mahasiswa dalam Kesiapsiagaan Bencana di STIKES Aisyiyah Yogyakarta, 2014.
- l. Penandatanganan MOU antara LPB PP Muh dan Rektor Univ Muhammadiyah Sumatera Utara untuk pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, Januari 2014.

(Kegiatan yang dilakukan mandiri ditingkat Wilayah, Daerah, Perguruan Tinggi dan Sekolah maupun Majelis terkait banyak yang belum terekam dalam laporan ini)

Ditingkat Universitas, kegiatan Pengarusutamaan PRB dilakukan sebagai berikut

- a. Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Univ Ahmad Dahlan Yogyakarta diinisiasi berdirinya Forum Mahasiswa Peduli Bencana, sebagai bagian dari program Humanitarian Forum Indonesia dan Oxfam.
- b. Di Program Pendidikan Geograafi UMS melakukan riset tentang kesiapsiagaan siswa dan warga sekolah di Klaten.

Kegiatan yang mendukung :

- a. LPB PP Muh aktif dalam Konsorsium Pedidikan Bencana sebagai salah satu presidium baik pada periode 2010 – 2012 , 2012 – 2014 dan 2014 – 2016.
- b. LPB PP Muh menjadi anggota working Group Pencapaian Sekolah Aman dalam Bulan Penringatan PRB Nasional yg diselenggarakan BNPB di Bengkulu 2014
- c. LPB PP Muh menjadi pembicara seminar dan menjadi fasilitator kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga lain seperti KPB, Save The Children, PLAN, Unicef, BPBD DIY, BPBD DKI untuk tema pendidikan bencana
- d. Prodi Pendidikan Geografi UMS mendorong skripsi Mahasiswa dalam tema Pendidikan bencana, hingga Oktober 2013 ada 3 judul skripsi
- e. Menjadi fasilitator kegiatan pelatihan Tim Bantuan Medis FK UMY pada beberapa kegiatan di tahun 2011 – 2015
- f. LPB PWM Jateng melaksanakan Basic training kerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jateng dengan peserta relawan dari kabupaten/kota di sekitar Perguruan Tinggi, di laksanakan pada tahun 2010-2011.

4. **Membentuk Jaringan Regional LPB** : Program pembentukan jaringan regional LPB diubah menjadi regionalisasi dopy tim dalam kegiatan tanggap darurat dengan perincian sebagai berikut :
- Deploy tim tanggap darurat untuk wilayah Sumatera dan Jawa Barat dibantu oleh tim dari RS dan relawan di Jakarta dan Palembang
 - Deploy tim tanggap darurat untuk wilayah Kalimantan dibantu oleh tim RS dan relawan dari Jawa Tengah dan DIY
 - Deploy tim untuk wilayah Indonesia Timur dibantu oleh tim RS dan Relawan dari Jawa Timur

Dalam pelaksanaannya regionalisasi ini memerlukan modifikasi dikarenakan tidak meratanya jenis dan tingkat kompetensi tim, sehingga dalam beberapa kasus tim SAR MUHAMMADIYAH dari Jawa Tengah juga harus mendukung kegiatan tanggap darurat ke daerah Jawa Barat, Sumatera dan Indonesia Timur. Demikian juga tim dari RS di DIY beberapa kasus harus membantu kejadian di Sumatera dan Jawa Tengah. Termasuk Tim Psikososial yang masih terpusat di DIY, yang harus diturunkan di semua wilayah kasus kejadian bencana.

5. **Menyusun Kaidah dan Tata Kelola LPB dengan Majelis dan Lembaga Lain** : dilakukan dengan penerbitan SK no **006/KEP/I.17/B/2012** tentang **Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah**
6. **Pelatihan peningkatan kapasitas Rumah Sakit Siaga Bencana** : Program ini berjalan dalam bentuk :
- Penyelesaian program Hospital and Community Preparedness for Disaster Management (HCPDM) 2009- 2011 bersama MPKU yang mengambil tempat di RS Muhammadiyah Palembang, RSIJ Pondok Kopi, RS PKU Muhammadiyah Bantul, RS Muhammadiyah Lamongan.
 - Penyelenggaraan Program VaCHRI – Peningkatan Kesiapsiagaan Komunitas dan RS di Lereng Gunung Merapi yang melibatkan RS/BP Muhammadiyah di DI Yogyakarta, Magelang, Boyolali, Klaten.
 - Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Siaga Bencana dengan legalisasi melalui SK LPB PP Muh No. 002/KEP/I.17/B/2014 . Terbitnya buku panduan ini sebagai buku panduan penerapan RS Siaga Bencana pertama di Indonesia dengan rujukan praktik baik yang berhasil dilakukan di RS Muhammadiyah dan Aisyiyah dengan didasarkan pada standar HOPE (Hospital Preparedness and Emergency), Hospital Safety Index – WHO dan referensi perarutan kerumahsakitian dari Kemenkes RI dan Akreditasi RS. Buku panduan ini menjadi buku panduan yang sesuai dengan kondisi riil RS Muhammadiyah/Aisyiyah karena disusun dengan pendekatan berjenjang sesuai dengan kemampuan minimal RS Muhammadiyah/Aisyiyah yang dibangun berdasarkan kekuatan komunitas dan jamaah. Buku panduan juga telah dimintakan rekomendasi kepada Majelis Pembina Kesehatan sebagai buku referensi RS Siaga Bencana di Muhammadiyah.
 - sosialisasi buku panduan RS Siaga Bencana dan Film hasil kegiatan HCPDM, VACHRI dan HPCRED melalui website www.mdmc.or.id dan Youtube. Model

sosialisasi ini berhasil menjadikan Muhammadiyah menjadi “icon” penyelenggaraan RS Siaga Bencana di Indonesia, karena satu-satunya lembaga baik pemerintah dan non pemerintah yang menyajikan hasil kegiatan dan video tutorial melalui jaringan internet.

- e. Menyelenggarakan Program *Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster* (HPCRED – 2015) bersama Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dengan fokus kegiatan : (a) membangun tim fasilitator dan modul di RS Muhammadiyah Lamongan, (b) membangun RS Siaga Bencana dengan Rencana Penanggulangan Bencana RS, Tim Kesehatan Tanggap Darurat dan Masyarakat sekeliling RS yang mendukung di RS Muhammadiyah Gresik, RS Islam Aisyiyah Malang, dan RS Siti Khadijah 1 Makassar.

Program ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah diakui oleh dunia internasional sebagai lembaga di Indonesia yang paling berkomitmen dengan upaya pewujudan RS Siaga Bencana atau RS Aman di Indonesia. Komitmen kerjasama program ini difokuskan pada penguatan kapasitas RS dan Tenaga Kesehatan di Jawa Timur dan Indonesia Timur, mengingat kurangnya jumlah maupun kapasitas tenaga kesehatan di wilayah Indonesia Timur dalam upaya penguatan RS dan Komunitas yang siap menghadapi kedaruratan dan bencana, serta masih dibutuhkannya tim kesehatan yang mampu menjadi tim respon cepat bidang kesehatan bila terjadi bencana di wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan penerapan Rumah Sakit Siaga Bencana juga didukung dengan kegiatan – kegiatan yang berjalan seiring dengan kampanye bersama mengenai perlunya Fasilitas Kesehatan yang Aman dari Kedaruratan dan Bencana, serta bagiand ari keberlanjutan komitmen Muhammadiyah terlibat dalam kampanye *Safe School and Hospital* pada tahun 2010 .

Kegiatan tersebut adalah :

- (a) Aktif dan menjadi pemangku kepentingan utama dalam pembahasan draft Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Kesehatan yang Aman dari Bencana dan Kedaruratan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan RI – mulai Juni 2014.

Upaya ini adalah sebagai dukungan Muhammadiyah agar pemerintah menegaskan komitmen dan koordinasinya untuk menciptakan rumah sakit sebagai fasilitas yang aman baik ketika terjadi kedaruratan maupun ketika terjadi bencana. Bila perturan presiden ini bisa berhasil diterbitkan, maka koordinasi antar kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan bahwa RS di Indonesia aman bila terjadi kedaruratan dan bencana bisa terwujud, juga untuk RS Muhammadiyah/Aisyiyah.

- (b) Memfasilitasi kerjasama PWM Jatim dan Tangtongsek Hospital – Temasek Singapura dalam pelatihan trainer kedaruratan medis untuk tenaga medis RS Muhammadiyah. Kegiatan ini menghasilkan Dokter dan Perawat yang menjadi instruktur pelatihan dan siap melatih pelatihan kedaruratan bidang medis. Sehingga Muhammadiyah saat ini siap menjadi salah satu pusat pelatihan kedaruratan dalam bidang medis.

- (c) Menjadi moderator working group Rumah Sakit Aman dalam bulan Peringatan PRB Nasional – BNPB 2014 di Bengkulu. Forum ini menghasilkan kesefahaman antara pelaku Rumah Sakit Aman dari bencana, Muhammadiyah dipilih menjadi moderator karena menjadi pelopor dan pelaksana paling aktif program Rumah Sakit Aman di Indonesia. Forum juga berhasil memetakan pelaku program Rumah Sakit Aman di Indonesia dan menjadi dasar penyusunan strategi implementasinya berikutnya dalam koordinasi Kementerian Kesehatan RI.
- (d) Mengisi Kuliah Tamu dalam Blok “Health System and Disaster” di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2013 dan 2014. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari kegiatan ko-kurikuler Fakultas Kedokteran UGM yang direkomendasikan menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran/ Pendidikan Dokter di PTM.
- (e) Sosialisasi konsep RS Siaga Bencana dalam pameran di FK UGM pada tahun 2012, 2013, 2014 . Kegiatan ini menjadi kegiatan efektif dalam pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan direkomendasikan diterapkan di Fakultas Kedokteran/Pendidikan Dokter di PTM.
- (f) Menyelenggarakan Seminar Pencapaian dan Tantangan Penerapan Safe Hospital bersama Yakkum Emergency Unit dan FK UGM pada peringatan bulan PRB di Fakultas Kedokteran UGM, 28 Oktober 2014.
- (g) Mensosialisasikan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh RS mengenai program terkait untuk mendapat dukungan peserta dari RS atau institusi lain.

IV. **Sumberdaya** : Hal yang berkaitan dengan aspek pendukung dan pelaku gerakan Muhammadiyah.

1. **Membentuk dan melatih relawan Muhammadiyah**

Relawan Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah kekuatan utama dalam operasional program penanggulangan bencana, walaupun pada periode 2010 – 2015 ini masih terfokus pada relawan yang diturunkan pada masa tanggap darurat. Penyebutan Relawan Muhammadiyah telah menjadi “icon” yang dimaknai oleh masyarakat sebagai Relawan Penanggulangan Bencana dari Muhammadiyah.

Tumbuhnya kelompok – kelompok relawan Muhammadiyah memerlukan pencermatan lebih, mengingat besarnya minat dari berbagai kalangan untuk terlibat. Timbulnya kelompok relawan yang menyebut dirinya sebagai Komunitas Relawan Muhammadiyah juga memerlukan upaya lebih untuk mengkoordinasikannya, mengingat komunitas tersebut lahir secara mandiri dan tidak memiliki hubungan organisasi dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah baik di Pusat maupun di Wilayah dan Daerah.

Upaya melakukan mediasi baik secara struktural maupun kultural Komunitas Relawan Muhammadiyah dan Lembaga Penanggulangan Bencana terus dilakukan, seperti yang dilakukan di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Sementara, selama 2010 – 2015 juga tumbuh dengan subur entitas relawan yang disebut sebagai SAR Muhammadiyah. Secara struktural, entitas relawan ini tumbuh dari LPB PWM Jawa Tengah yang mengembangkannya dengan sistematis disertai sistem pendidikannya yang dikembangkan. Sementara di area DI Yogyakarta entitas ini berkembang dengan diawali oleh pembentukan tim SAR Muhammadiyah oleh LPB PP Muhammadiyah pada tahun 2011. Tim ini pada tahun 2012 mengadakan Diklat SAR untuk Angkatan Muda Muhammadiyah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Alumninya kemudian pada tahun 2014 diintegrasikan ke sistem Lembaga Penanggulangan Bencana DI Yogyakarta, bersamaan dengan pelatihan SAR Muhammadiyah DIY yang diselenggarakan secara mandiri oleh LPB PWM DIY. Inisiatif menarik terjadi dengan adanya pelatihan SAR di LPB PWM Jawa Timur yang diterapkan pada relawan bidang kesehatan yang disebut sebagai SAR Medis. Inisiasi, inovasi, modifikasi pelatihan SAR ini kedepan memerlukan pembakuan kompetensi yang menjadi acuan pelatihan, apalagi sebenarnya pelatihan SAR di kalangan Muhammadiyah telah dilakukan oleh KOKAM Pemuda Muhammadiyah, Kepanduan Hisbul Wathan dan Tapak Suci yang belum terintegrasi optimal dalam sistem gerakan dan mobilisasi sumberdaya relawan yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana.

Pada relawan bidang kesehatan, telah lebih dahulu berkembang sejak inisiasi berdirinya Pusat Penanggulangan Bencana dibawah koordinasi MKKM pada tahun 2007 – 2010. Relawan bidang kesehatan ini disebut sebagai *Disaster Medical Commite* (DMC) yang menjadi bagian organik dari RS Muhammadiyah dan Aisyiyah. Perkembangan DMC pada tahun 2010 – 2015 terus dilakukan dengan koordinasi erat dengan Majelis Pembina Kesehatan Umum, bahkan ketika melakukan respon tanggap darurat relawan dari unsur DMC ini menjadi relawan yang paling siap diberangkatkan, mengingat relatif mapannya institusi Rumah Sakit Muhammadiyah. Namun kapasitas baik kompetensi personal, kelembagaan maupun kompetensi manajerial masih tidak merata, walaupun jumlah DMC tidak kurang dari 40 Rumah Sakit, sebagai anggota kluster kesehatan dengan kekuatan terbesar.

Program pelatihan relawan secara praktis ada sebagai berikut :

- a. Latihan gabungan pada 29 Juni 2011 di Lanud AL Juanda Surabaya diikuti oleh relawan Disaster Medic Commite dan SAR .
- b. Latihan Gabungan dan Jambore Nasional Relawan pada November 2013 di Bantul Yogyakarta, diikuti oleh relawan SAR, Medis dan Psikososial,
- c. Diklat SAR Muhammadiyah oleh LPB PP Muh tahun 2012 di lereng Merapi dengan peserta dari DIY,
- d. Diklat SAR Muhammadiyah Jawa Tengah dilakukan oleh LPB Jawa Tengah dengan strata Dasar, Madya dan Purna yang dilakukan kontinyu bersama LPB PDM se Jateng sejak tahun 2010 – 2014 .
 - Pendidikan dan Pelatihan SAR (Search And Rescue) tingkat Dasar di Jawa Tengah diselenggarakan sebanyak 8 kali sejak tahun 2010 dan berakhir

tahun 2013. Jumlah alumni Diklat SAR Dasar mencapai 275 orang. Beberapa LPB P DM yang telah sukses menjalankan kegiatan Diklat SAR tingkat Dasar antara lain : Banyumas, Pemalang, Klaten, Kendal, Karanganyar, Surakarta, dan Sukoharjo .

- Pendidikan dan Pelatihan SAR (*Search And Rescue*) tingkat lanjut (madya) di Jawa Tengah jumlah alumni Madya mencapai 112 orang. Diklat Madya telah diselenggarakan sebanyak 4 kali.
 - Diklat Purna sudah diselenggarakan 2 kali, jumlah alumni Purna mencapai 30 orang
- d. Diklat SAR Medis dilakukan oleh LPB PWM Jatim pada Februari 2013 di ngantang Malang ,
 - e. Diklat SAR Muhammadiyah LPB DKI diselenggarakan bersama LPB PWM Jateng,
 - f. Diklat SAR Muhammadiyah DIY diselenggarakan oleh LPB PWM DIY, Oktober 2014, Diklat SAR LPB PDM Kota Makassar 2012
 - g. Pelatihan Disaster Medic Commite diselenggarakan oleh RS Muhammadiyah secara mandiri (data belum terekap),
 - h. Latihan Gabungan Relawan LPB PWM Jateng 2012 dan 2014,
 - i. Diklat Relawan Penanggulangan Bencana di wilayah Jatim (terekap LPB PDM Surabaya, Mei 2014, yang lain belum terekap),
 - j. Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana PDM Garut (2012),
 - k. Fasilitasi pembentukan Komunitas Relawan Muhammadiyah di Yogyakarta, Jakarta, Maluku.
 - l. Fasilitasi pembentukan komunitas relawan psikologi di F Psi UAD (2013).
 - m. pelatihan manajemen Posko Tanggap Darurat di LPB PWM Sulawesi Utara (2013).
 - n. Pelatihan Relawan LPB PWM Sulawesi Utara (2014)
 - o. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Latihan Gabungan LPB PWM DKI, Januari 2015.
 - p. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Latihan Gabungan LPB PWM Jawa Barat , Februari 2015.
 - q. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Latihan Gabungan LPB PWM DIY, Februari – Maret 2015.
 - r. Latihan Gabungan Relawan Jawa Timur, Februari 2015.
 - s. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Latihan Gabungan Relawan Sulawesi Selatan, Februari – Maret 2015
 - t. LPB PWM Jateng mengembangkan pelatihan Psikososial bersama PW NA (Pimpinan Wilayah Nasyyatul Aisyiyah) Jateng. Jumlah peserta yang terlibat dalam diklat psikososial mencapai 40 orang yang berasal dari pengurus N A dan pengurus LPB Daerah di Jawa Tengah.
 - u. LPB PWM Jateng mengadakan pelatihan sertifikasi selam bekerja sama dengan POSSI Jateng yang di ikuti oleh 7 peserta dari LPB daerah di laksanakan tahun 2014

2. **Penyusunan Standar Pengelolaan Posko**

Standar pengelolaan posko memerlukan proses bertahap dalam penyusunannya, diawali dengan melakukan kajian pada dokumen yang disiapkan oleh tim MDMC periode 2007 – 2010, kajian komparasi dengan dokumen yang diterbitkan oleh BNPB mengenai Sistem Komando Operasi Tanggap Darurat dan kemudian dilakukan kajian berdasarkan pengalaman tim Muhammadiyah sejak penanganan Tsunami Aceh 2004, Gempa Bumi Yogyakarta 2006, Gempa Bumi Padang 2009, dan Erupsi G. Merapi 2010. Pengalaman penanganan kejadian bencana lain yang lebih mikro juga menjadi bahan kajian dalam penyusunan panduan. Proses penyusunan pada tahun 2012 berakhir dengan selesainya pembahasan dan dikukuhkan dengan penerbitan SK LPB Nomor: 008/KEP/I.17/B/2012 tentang Pedoman Penanganan Tanggap Darurat, Panduan pengelolaan logistik tanggap darurat.

Standar penyusunan posko ini terus mengalami kajian hingga akhir periode, khususnya dengan ikut sertanya delegasi Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah pada pelatihan *Incident Comand System* (ICS) yang diselenggarakan BNPB pada tahun 2013. Kajian selanjutnya dilakukan pada februari – maret 2015 bersamaan dengan program *Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster* (HPCRED – 2015) yang salah satu outputnya berupa modul pelatihan *Incident Comand System* (ICS) yang kemudian diadaptasi dengan istilah Sistem Pengendali Operasi (SPO).

Diharapkan dengan selesainya modul pelatihan Sistem Pengendali Operasi (SPO) akan menjembatani kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Pengelolaan Posko dan revisinya agar lebih operasional di lapangan.

3. **Pengadaan perlengkapan dan Peralatan komando dan relawan dalam penanganan tanggap darurat bencana :**

Pengadaan perlengkapan dan peralatan komando dilakukan secara bertahap, dimana diawal periode dilakukan karena langsung menghadapi kejadian erupsi Gunung Merapi 2010 dan LPB PP Muhammadiyah membuka Pusat Koordinasi di kantor PP Muhammadiyah, Jl Cik Di Tiro Yogyakarta. Pinjaman satu mobil dari LAZISMU yang diawal sebagai mobil komando pada kegiatan erupsi Gunung Merapi 2010 tersebut akhirnya digunakan hingga akhir periode dan sangat membantu dalam kegiatan asistensi tim tanggap darurat LPB PP Muhammadiyah.

Perlengkapan lain yang telah diadakan adalah dengan pengadaan alat komunikasi HT dan RIG HT untuk perlengkapan operasi, pengadaan 2 buah perahu karet, pengadaan kamera untuk operasional tim . Sementara telepon satelit menjadi salah satu alat yang dibeli oleh pengurus MDMC periode sebelumnya. Perlengkapan lain yang sudah dimiliki oleh LPB PP Muhammadiyah adalah 7 set tenda rumah sakit lapangan yang merupakan hibah pemerintah australia kepada PP Muhammadiyah pasca Gempa Bumi Yogyakarta 2006, genset dan perlengkapan mesin penjernih air.

Pada tahun 2013, LPB PP Muhammadiyah mendapatkan hibah selimut dari donatur dari Singapura sebanyak 3000 buah dan pada tahun 2014 mendapat hibah dari UNICEF 1000 paket paket anak untuk pendidikan pada masa darurat, 20 paket untuk sekolah darurat dan paket permainan rekreasional.

Pada maret 2014, LPB PP Muhammadiyah juga mendapatkan 1000 paket penjernih air keluarga dari donasi Palang Merah Singapura dan Good Water Company. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 juga didapatkan bantuan sabun cuci pakaian, sabun untuk pembersih lantai dan sabun untuk mencuci perlengkapan makan dari Yuri masing – masing sebanyak 200 paket.

Pembelajaran dari pelaksanaan program ini, berbagai lembaga percaya kepada Muhammadiyah untuk menitipkan sumberdayanya, namun sistem yang dibangun oleh Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah maupun lembaga ditingkat PWM dan PDM belum mampu sepenuhnya mengelolanya. Penguatan sistem logistik baik membangun sistem maupun membangun kapasitas sumberdaya manusia menjadi agenda penting dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program ini. Besarnya harapan masyarakat, lembaga usaha dan juga pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menggunakan jaringan Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan perlu disambut baik.

V. **Aksi Pelayanan** : Hal yang berkaitan dengan aktivitas secara langsung dan dapat dinikmati hasilnya oleh anggota Muhammadiyah dan masyarakat luas.

1. **Identifikasi resiko (database resiko dan kapasitas kebencanaan Muhammadiyah)** : Program ini terealisasi dengan penerbitan buku Potensi Muhammadiyah dan Risiko Bencana dengan menampalkan sebaran potensi amal usaha dan pimpinan Muhammadiyah Se Indonesia dengan data Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan BNPB.

Buku yang diterbitkan tersebut diatas cukup membantu untuk menjadi dasar bagi penentuan lokasi program kerja, khususnya yang memerlukan intervensi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya risiko bencana dan besar – kecilnya potensi Muhammadiyah yang ada di lokasi tersebut.

Database tersebut kemudian dibantu dengan data pesebaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.

Persebaran potensi Muhammadiyah yang nyaris tersebar diseluruh Indonesia tersebut memiliki arti :

- jaringan Muhammadiyah adalah bagian dari KAPASITAS bangsa menghadapi bencana yang mendukung sistem penanggulangan bencana di seluruh daerah
- jaringan Muhammadiyah adalah bagian dari KERENTANAN bangsa yang juga menjadi bagian cukup besar yang terancam bencana di seluruh daerah di Indonesia.

2. **Pengkajian kerentanan dan dampak dengan menguatkan 6 pusat studi bencana**
: Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdiri di :
 - (1) Univ Muh Yogyakarta,
 - (2) Univ Ahmad dahlan,
 - (3) Univ Muhammadiyah Bengkulu,
 - (4) Univ Muhammadiyah Purwokerto ,
 - (5) Univ Muhammadiyah Surakarta (prodi Pend. Geografi),
 - (6) Univ Muhammadiyah Sumatera Utara (inisiasi).

3. **Perencanaan dan pelaksanaan mitigasi struktural pada aset muhammadiyah** : belum dilaksanakan, masih dalam proses penunjukan Tim dan Penyusunan Kerangka Acuan kegiatan.

4. **Menyusun dan melaksanakan rencana kontijensi pada setiap kasus bencana** : secara internal telah dilakukan inisiasi untuk membangun kontijensi internal Jaringan Muhammadiyah untuk menghadapi banjir bengawan solo dengan workshop kontijensi pada tahun 2011 di Univ Muhammadiyah Surakarta.

5. **Penanganan Tanggap Darurat sesuai skala bencana dan kapasitas Muhammadiyah Lokal** : Kegiatan ini dirangkai dengan kegiatan pemulihan yang paling banyak dilakukan dalam kurun waktu 2010 – 2014 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. **Tahun 2010** : Erupsi G. Sinabung, Erupsi G. Merapi, Banjir Wasior, Tsunami Mentawai, Erupsi G. Bromo
 - b. **Tahun 2011** : Erupsi G. Merapi, Banjir Tangse – Pidie – Aceh, Banjir Garut Selatan, Gas Beracun Dieng, Erupsi G. Lokon, Banjir Pesisir Selatan – Sumbar, Erupsi G. Gamalama Maluku Utara, Banjir Pati – Jateng, Banjir-Longsor Wonosobo – Jateng,
 - c. **Tahun 2012** : Banjir Bengawan Solo, Banjir Lombok Timur, Longsor Temanggung, Banjir Kota Padang, Banjir Bandang Kota Ambon, Banjir Bandang Pulau Seram, Gempa Sigi Sulteng, Banjir Parigi Sulteng, Gempa Bumi Bogor, Konflik Sosial – Balinuraga – Lampung, Banjir Singkil – Aceh, Pengungsi Rohingya – Medan, Banjir Soreang – bandung, Banjir Barito Utara – Kalimantan Tengah,
 - d. **Tahun 2013** : Banjir Maros – Bonep-Pangkep Sulsel, Banjir Jakarta, Erupsi Lokon, Banjir Minahasa, Erupsi G. Rokatenda NTT, Banjir Manado, Banjir Sampang Madura, Gempa Dieng, Tanah Longsor – Tanah bergerak Cigintung Majalengka, Pendampingan Pengungsi Korban Konflik Sampang – di Sidoarjo, Gempa Lombok Utara, Gempa Aceh Tengah, Banjir Sulawesi Tenggara, Banjir bendungan Way Ela Ambon, Erupsi G. Rokatenda NTT, Erupsi G. Sinabung Karo , Banjir Purworejo, Banjir Jawa Timur (Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya)

Misi Luar Negeri : Respon Baday Hayan Filipina

- e. **Tahun 2014** : Banjir Jakarta, Banjir Jawa Barat (Bekasi, Subang, Karawang, Indramayu), Banjir Jawa Tengah (Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Pati), Banjir Bandang Manado, Erupsi G. Sinabung, Banjir Aceh, Tanah longsor Banjarnegara, Banjir Baleendah Bandung Barat.

- f. **Tahun 2015** : Rehabilitasi Longsor Banjarnegara, Banjir Indramayu.
Misi Luar Negeri : Respon Gempa Nepal

6. **Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi – Rekonstruksi Muhammadiyah** : (a) Belum pernah dilakukan karena pertimbangan tidak ada bencana kurun 2010 – 2014 yang membutuhkan upaya masif di internal Muhammadiyah untuk melakukan Rehabilitasi Rekonstruksi. (b) penyusunan buku panduan penyusunan rencana aksi belum berjalan.

D. Problematika

Pelaksanaan program kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2010 – 2015 menghadapi berbagai tantangan baik pada sisi konseptual, organisasi maupun pada sisi sumberdaya dan operasional. Tantangan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Secara konseptual program Penanggulangan Bencana di awal periode masih mencari bentuk untuk mengintegrasikan konsep kesejarahan yang identik dengan konsep Penolong Kesengsaraan Oemoem, spirit ideologi mengenai tafsir Al Maun dengan konvensi yang berlaku secara internasional seperti Kode Perilaku Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Hukum Humaniter Internasional, hingga kesepakatan Internasional mengenai Pengurangan Risiko Bencana (Hygo Framework for Action) dan terbitnya Undang – Undang Penanggulangan Bencana no 24 tahun 2007. Tidak adanya konsep yang
- b. Secara organisatoris, lembaga penanggulangan bencana pada awal periode sangat terbantu dengan konsep keorganisasian yang disiapkan oleh tim Pusat Penanggulangan Bencana Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (2005 – 2010). Namun konsep ini memerlukan proses untuk dilakukan kajian mengingat begitu LPB PP Muh dibentuk langsung menghadapi kejadian penanggulangan bencana dengan skala nasional. Setelah ditetapkan panduannyapun, hambatan pelaksanaan di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah tetap dihadapi. Mengingat kegiatan penanggulangan bencana masih belum dianggap oleh pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebagai kegiatan yang penting dilakukan, dilain sisi antusiasme angkatan Muda untuk terlibat dalam kegiatan tinggi sekali.
- c. Struktur organisasi LPB periode saat ini belum dapat mengakomodir kerja kemanusiaan dengan dinamika yang tinggi, sehingga tupoksi/jobdesc, pengambilan keputusan, dan pendelegasian wewenang belum berjalan dan terdistribusi dengan baik. Struktur organisasi LPB periode ini belum memberikan ruang yang cukup bagi masing-masing bidang/divisi dalam pengambilan keputusan terkait program prioritas.
- d. Secara manajemen jaringan, lembaga penanggulangan bencana menghadapi tantangan dengan posisi lembaga patner dalam kegiatan penanggulangan bencana di tingkat nasional yang berada di Jakarta. Koordinasi yang nyaris perlu diikuti setiap pekan di Jakarta mengharuskan pengurus LPB PP Muh yang berpusat di Yogyakarta untuk bergantian ke Jakarta. Tantangan ini dihadapi dengan menambah personil pimpinan yang berdomisili di Jakarta, walaupun masih belum optimal karena sebagian kegiatan

memerlukan pengambil kebijakan yang belum bisa didelegasikan seluruhnya dengan dengan pimpinan yang berdomisili di Jakarta.

- e. Secara manajemen sumberdaya, lembaga penanggulangan bencana menghadapi dengan belum adanya sistem pengelolaan sumberdaya penanggulangan bencana yang masuk dalam sistem Muhammadiyah. Melimpahnya sumberdaya relawan dan antusiasmenya masyarakat menitipkan sumbangan kepada Muhammadiyah, khususnya ketika terjadi bencana, sempat menjadi tantangan mengingat pengelolaan yang tidak dilakukan dengan full timer. Selain itu tantangan yang dihadapi adalah tidak meratanya kompetensi SDM yang ada, terlalu banyaknya SDM dengan kompetensi tingkat pelaksana dan kurangnya SDM dengan kompetensi tingkat manajerial dan pimpinan.
- f. LPB PWM dan PDM belum optimal dalam berkomunikasi dengan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga penguatan jaringan termasuk upaya memasukkan ide-ide Muhammadiyah dalam upaya penanggulangan bencana menjadi terhambat.
- g. Tidak cukup banyak personil pimpinan untuk di kirim dan menjalin kerjasama dengan NGO dan aktif dalam jaringan seperti Platform Pengurangan Risiko Bencana yang berdampak pada personal yang di kirim berganti –ganti sehingga kurang fokus.
- h. Dalam menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang terus membuka kesempatan baik dalam koordinasi, pelatihan maupun presenter forum internasional tidak banyak Pimpinan LPB banyak yang tidak bisa berkomunikasi secara aktif dalam bahasa inggris.
- i. Dalam Aksi pelayanan, Lembaga Penanggulangan Bencana menghadapi beruntunnya tuntutan perlunya respon bencana nyaris di seluruh wilayah Indonesia, sementara kapasitas penanganan masih terpusat di pulau Jawa. Sehingga perlu melakukan pendekatan kepada PWM Jawa Tengah dan Jawa Timur serta amal usaha khususnya RS di pulau jawa untuk membantu pelayanan.

E. Saran – Saran

Belajar dari pelaksanaan program penanggulangan bencana periode 2010 – 2015, maka direkomendasikan saran – saran sebagai berikut :

- a. Dengan terbitnya Fikih Kebencanaan secara operasional memerlukan kurikulum pelatihannya bagi pelaku penanggulangan bencana di Muhammadiyah, periode kedepan perlu disusun sehingga bisa menjadi panduan penyelenggaraan pelatihan baik terintegasi pada pelatihan kompetensi relawan, pelatihan manajemen penanggulangan bencana maupun pelatihan khusus.
- b. Untuk periode kedepan, bentuk Lembaga Penanggulangan Bencana perlu dipertahankan, dan tidak perlu menjadi majelis. Mengingat fungsi utamanya adalah melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan bencana dimana sumberdayanya ada di majelis, lembaga, amal usaha dan organisasi otonom yang ada.
- c. Program tanggap darurat berjalan cukup efektif dengan mengerakkan sumberdaya persyarikatan, namun periode kedepan perlu ada koordinasi dan sinergi lintas Majelis dan Lembaga untuk optimalisasi kegiatan penanggulangan bencana.
- d. Periode berikutnya di awal kepemimpinan perlu menyusun perangkat lunak tata kelola kelembagaan LPB yang meliputi Struktur dan sistem komando Organisasi tingkat Nasional dan Wilayah, penyusunan Prosedur Standar Pengelolaan Keuangan, Panduan Mekanisme

- Fundraising, Panduan Pengelolaan Informasi dan pengetahuan, serta pembahasan Indikator capaian program kerja.
- e. Perlu melakukan peningkatan dan menerapkan sistem keorganisasian dan kepemimpinan LPB di Pusat, Wilayah, dan Daerah yang transformatif untuk perubahan masa depan dengan berorientasi pada ketangguhan bencana.
 - f. Perlu melakukan pemerataan dan peningkatan kapasitas pengurus dan calon pengurus LPB di tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang sebagai penggerak ketangguhan di tingkat basis.
 - g. Periode berikutnya perlu melakukan workshop pembuatan konsep dan roadmap jama'ah tangguh bencana dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Majelis Tabligh dan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.

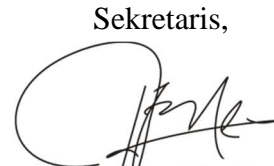
F. Penutup

Laporan ini disusun dan disampaikan berdasarkan kesepakatan Rapat Kerja Pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, 10 April 2015. Laporan disusun sebagai pertanggungjawaban dari amanah Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 sebagai bahan evaluasi untuk Muktamar Muhammadiyah 2015 dan dasar pembelajaran untuk penyusunan program 2015-2010.

Yogyakarta, 11 April 2015

Ketua,

H. Budi Setiawan, S.T.

Sekretaris,

Arif Nur Kholis

